

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2026

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKT PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RKT PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
3. RKT PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui kinerja PD.

Oleh karena itu.....

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

21. Peraturan.....

21. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB II

VISI, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2023 yaitu " Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasab Lingkungan.

2.2 TUJUAN , SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Misi ke-1 (Satu) yaitu " Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani "

Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Target (2026)	Target Akhir Renstra 2030
1	Meningkatnya digitalisasi	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	1,70	3,10

	tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan				
2		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Masyarakat	Nilai	2,00	3,60
		Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Niali	1,50	3,10
3		Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	Persen	75,42	78,52
4		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	65,00	85,00
5	Meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Satu Data Indonesia	Nilai	51,00	71,00
6		Indeks Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Nilai	1,40	2,60
7	Meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan	Indeks KAMI	Nilai	451	584

	dalam pelaksanaan pembangunan				
8		Indeks Keamanan Siber	Nilai	1,60	2,60

BAB III

Rencana Kerja Tahunan dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Program dan Kegiatan

a) Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 adalah Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Kartanegara 2025 - 2045: "Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan"

Untuk mencapai Visi tersebut maka dilakukan berbagai upaya strategis, salah satu upaya itu dituangkan dalam Sasaran RPJPD Kabupaten kutai Kartanegara. Dalam Sasaran RPJPD, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 Tujuan dan 4 Sasaran yang sudah ditetapkan melalui turunan Sasaran RPJMD Kabupaten antara lain :

Tujuan :

"Meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan".

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan
2. Meningkatnya akses telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat
3. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi pembangunan
4. Meningkatnya tingkat keamanan persandian

b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Program yang direncanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin dan 4 (empat) Program Urusan Pemerintahan.

Rincian Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dari 5.....

Dari 5 (lima) Program diatas, dijabarkanlah ke dalam bentuk Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 10 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana pagu dari seluruh Program / Kegiatan tersebut pada tahun 2026 sebesar **Rp. 77.218.501.309,90,- (Tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus satu ribu tiga ratus sembilan rupiah sembilan puluh sen)**

c) Rumusan Program dan Kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a. Adanya Penyesuaian Output Indikator Sub Kegiatan
- b. Adanya perubahan nomenklatur subkegiatan yang ada di SIPD
- c. Adanya pemetaan nomenklatur subkegiatan yang baru dari subkegiatan lama yang ada di Renstra dengan subkegiatan baru yang ada di SIPD
- d. Adanya tambahan subkegiatan baru menyesuaikan dengan analisis kebutuhan dan paket pekerjaan
- e. Adanya usulan Musrenbang Kecamatan

d) Tabel.....

d) Tabel Rencana Kerja Tahunan dan Kegiatan sebagai berikut :

**RUMUSAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN KEGIATAN TAHUN 2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
					Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Masyarakat		2,00 Nilai		
					Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah		1,50 Nilai		
					Meningkatnya Akses Telekomunikasi dan Informasi Kepada Masyarakat	Persentase Penduduk Berusia 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir		75,42 Persen		
					Meningkatnya Akses Telekomunikasi dan Informasi Kepada Masyarakat	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah		65,00 Persen		
					Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan	Indeks Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi		1,40 Nilai		
					Meningkatnya Tingkat Keamanan Persandian	Indeks Keamanan Siber		1,60 Nilai		
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75,00 Nilai	27.891.815.466	
2	1	1	2.0		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Dokumen	50.000.000	
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggar ong	2 Dokumen	50.000.000	APBD
2	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		2 Laporan	11.128.810.893,40	APBD
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggar ong	1078 Orang/Bulan	11.000.890.893,40	APBD
2	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggar ong	4 Laporan	127.920.000	APBD
2	1	1	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		2 Dokumen	9.000.000	

2	1 6	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggar ong	2 Laporan	9.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		5 Layanan	1.152.866.000	
2	1 6	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggar ong	1 Paket	145.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggar ong	1 Paket	200.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggar ong	1 Paket	200.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggar ong, Luar Daerah	34 Laporan	107.866.000	APBD
2	1 6	1	2.0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggar ong	1 Dokumen	500.000.000	
2	1 6	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	15.171.315.763	
2	1 6	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tenggar ong	1 Laporan	1.000.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Tenggar ong	3 Laporan	14.171.315.762.50	APBD
2	1 6	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		28 Unit	379.822.810	
2	1 6	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tenggar ong	20 Unit	379.822.810	APBD
2	1 6	2	2.0 1		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen	17.500.000.000	
2	1 6	2	2.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola		840 Informasi dan Komunikasi Publik	17.500.000.000	
2	1 6	2	02. 01	2 1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		30 Media	17.500.000.000	APBD
2	1 6	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD		100 Persen	30.880.333.828	

2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government		58 OPD	30.880.333.828	
2	16	3	02.02.04	0224	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	56 Perangkat Daerah	21.361.265.000	APBD
2	16	3	02.02.06	0236	Penyediaan Akses Internet	Jumlah perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Kutai Kartanegara	56 Perangkat Daerah	9.519.068.828	APBD
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				30.880.333.828	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		100 Persen	349.075.000	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		58 OPD	349.075.000	
2	20	2	2.01	019	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Tenggarong	100 Presentase	349.075.000	APBD
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				597.277.016	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi		100 Persen	597.277.016	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah		56 OPD	597.277.016	
2	21	2	02.01.07	0217	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Tenggarong	56 Perangkat Daerah	597.277.016	APBD
TOTAL									77.218.501.309.90	-

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tujuan dari akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance). Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2026 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 ini merupakan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara .

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026.

Kutai Kartanegara, 19 Januari 2026
PIL. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

SOLIHIN, S.Sos., MT
NIP. 19721029 199102 1 001